

Nama : Virginia Shaulan Zailani

NPM : 2413031069

Kelas : B

STUDY CASE

Keputusan PT Garuda Sejahtera untuk menggunakan nilai wajar (fair value) sebagai dasar pengukuran pesawat dalam laporan keuangannya dapat dipahami dari perspektif kerangka konseptual IFRS. Dalam kerangka konseptual IFRS, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (faithful representation) bagi investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya, terutama dalam konteks pasar global. Penggunaan nilai wajar dianggap mampu mencerminkan nilai ekonomi terkini dari suatu aset serta sejalan dengan prinsip substance over form, yaitu penekanan pada realitas ekonomi dibandingkan bentuk hukum. Oleh karena itu, jika PT Garuda Sejahtera berorientasi untuk menarik investor asing dan meningkatkan daya banding laporan keuangannya secara internasional, maka penggunaan nilai wajar secara konseptual dapat dibenarkan menurut IFRS.

Namun demikian, penerapan nilai wajar dalam konteks Indonesia perlu dikritisi dengan mengacu pada kerangka konseptual PSAK. PSAK menekankan keseimbangan antara relevansi dan keandalan informasi, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudence). Dalam kondisi pasar Indonesia, khususnya untuk aset pesawat terbang, pasar aktif yang dapat menjadi dasar penentuan nilai wajar masih sangat terbatas. Akibatnya, pengukuran nilai wajar sangat bergantung pada estimasi dan asumsi manajemen, yang berpotensi menurunkan tingkat keandalan dan verifiabilitas informasi. Dalam situasi seperti ini, penggunaan biaya historis dapat dianggap lebih konservatif dan andal karena didasarkan pada transaksi aktual yang dapat diverifikasi. Oleh sebab itu, catatan kritis dari auditor terhadap penggunaan nilai wajar memiliki dasar yang kuat menurut kerangka konseptual PSAK.

Perbedaan pandangan tersebut tidak terlepas dari perbedaan penekanan antara kerangka konseptual PSAK dan IFRS. Baik PSAK maupun IFRS memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, IFRS lebih berorientasi pada kebutuhan investor dan pasar modal global, sedangkan PSAK disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik lingkungan bisnis nasional. Dalam hal karakteristik kualitatif informasi, IFRS menekankan relevansi dan faithful representation dengan pendekatan yang lebih netral terhadap risiko, sementara PSAK masih memberikan ruang yang lebih besar

terhadap prinsip kehati-hatian untuk menjaga keandalan informasi. Perbedaan ini juga tercermin dalam basis pengukuran, di mana IFRS lebih luas menggunakan nilai wajar, sedangkan PSAK cenderung lebih mengutamakan biaya historis, terutama dalam kondisi pasar yang belum sepenuhnya efisien.

Dalam aspek asumsi entitas dan kelangsungan usaha, baik PSAK maupun IFRS sama-sama mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi di masa depan. Namun, pendekatan PSAK terhadap ketidakpastian ekonomi cenderung lebih konservatif, sementara IFRS lebih forward-looking dan berbasis ekspektasi pasar. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK mengacu pada IFRS, terdapat penyesuaian yang diperlukan agar standar akuntansi tetap relevan dan andal dalam konteks nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Indonesia sebaiknya tidak mengadopsi kerangka konseptual IFRS secara penuh tanpa penyesuaian lokal. Faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan nilai wajar secara luas dan andal. Pasar keuangan yang belum sepenuhnya efisien, tingkat literasi akuntansi yang belum merata, serta risiko manipulasi estimasi menjadi alasan kuat perlunya pendekatan yang lebih adaptif. Dalam hal ini, kerangka konseptual PSAK yang mengadopsi IFRS secara bertahap dan selektif merupakan pilihan yang lebih realistis, karena mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan harmonisasi global dan keandalan informasi keuangan di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar dapat dibenarkan secara konseptual menurut IFRS, namun dalam konteks Indonesia keputusan tersebut harus disertai kehati-hatian yang tinggi serta pengungkapan yang memadai. Kerangka konseptual PSAK tetap memiliki peran penting sebagai penyeimbang agar laporan keuangan tidak hanya relevan bagi investor global, tetapi juga andal dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan di dalam negeri.